



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Jl. Hasanudin No. 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111 Telp. (0532) 22418

Email : dlsperkdin.kotawaringinbarat@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR : 300/361 /PERKIM.I/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.01.00/001/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pengesahan DPPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- b. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 821/147/BKPP.III/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan yang dimuat dalam DPPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu menetapkan Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa nama yang telah ditunjuk dan ditetapkan dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PPTK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
- e. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada point a, b dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Perubahan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
13. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 00112/26201/AZ/09/20 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pemberian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor DPA/A.1/1.04.2.10.0.00.01.00/001/2021 tanggal 20 Januari 2021 .
15. Surat dari Bupati Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 900/231/II/BPKAD/2021 Tanggal 26 Februari 2021 Perihal Pengelola Keuangan Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Penunjukan Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.



- SATU : Menunjuk / mengangkat pegawai / pejabat tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa ;
  4. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan;
  5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan kepada PA/KPA ;
  7. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  8. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan .

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam DPPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 02 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PEMUKIMAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**Dr. Ir. M. HASYIM MUALLIM, MT**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19670817 199503 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat  
Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ktw. Barat
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.
5. Arsip.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBSAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  
 Nomor : 300/ /PERKIM.I/2021  
 Tanggal : 02 Agustus 2021  
 Tentang : Penunjukan Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas (PPTK)  
 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

No.	Nama	Untuk Menangani	
		Program	Kegiatan
1	2	3	4
1.	Nama : RETNO LESTARI, ST.,MT NIP : 19710304 200604 2 025 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : SEKRETARIS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Pengamanan Barang Milik Daerah
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

		<p>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</li> <li>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ol>
		<p>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</li> <li>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ol>
		<p>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>
		<p>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>2. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya</li> </ol>
<p>2.</p>	<p>Nama : ALDRIN, SP  NIP : 196908071998031005  Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)  Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN</p>	<p>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> <p>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</li> </ol>



		2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
3.	Nama : LETUS KILAT MANTIKEI, SH.,M.Si NIP : 19700910 199603 1 005 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : KEPALA BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota  PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota  1. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
SEKRETARIAT	
JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KASUBDAG	
PELAKSANA	

KEPALA DINAS PEUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PEMUKIMAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Dr. Ir. M. HASYIM MUALLIM, MT  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19670817 199503 1 007